

36A/90
c1(2)

HUKUM

Laporan Hasil Penelitian

Untuk Proyek DPP/SPP/1980//1991

Surat Perjanjian No : 070/PP-UA/SPP-07/1990

PENGARUH PEMBANGUNAN TERHADAP PENGUASAAN TANAH
DI KOTAMADYA PADANG

Dien : HERMAYULIS, SH, MSe.
NIF. 131 473 257



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pusat Penelitian UNIVERSITAS ANDALAS

Padang, 1990

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salim (1986) mengemukakan bahwa sebagai negara yang sedang berkembang masalah pokok yang dihadapi Indonesia adalah mendobrak keterbelakangan ekonomi dan meletakkan landasan bagi penghalauan kemiskinan. Untuk ini diperlukan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk mengolah sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati melalui pmdayagunaan sumber daya manusia.

Persoalan pembangunan, khususnya dibidang ekonomi senantiasa menjadi pusat perhatian bagi masyarakat, terutama di negara yang baru saja mengembangkan sayapnya.

Pembangunan di bidang ekonomi tanpa dapat dihindarkan akan melanda sektor kehidupan sosial budaya lainnya. Pengambil alihan teknologi modern untuk mendorong dan mempercepat proses pembangunan, akan memaksa penduduk untuk menyesuaikan pola tingkah laku dan kelembagaan sosial yang berkaitan sehingga terlihat gejala perkembangan sosial budaya yang melanda masyarakat yang sedang membangun.

Dengan demikian terlihat bahwa kegiatan pembangunan dapat menimbulkan perubahan-perubahan besar dalam bidang politik, pendidikan, religi, lingkungan keluarga, stratifikasi dan mobilitas geografis dan sosial. Di samping itu juga dapat menimbulkan perubahan dalam pola penguasaan dan pola penggunaan tanah yang merupakan modal utama bagi petani. Pergeseran tersebut

terjadi karena tanah yang semula merupakan kekayaan sosial dan menjadi landasan utama struktur masyarakat pedesaan, kini berubah menjadi kekayaan ekonomis yang semata menjadi bagian dari sarana produksi. Sehingga terlihat pola penguasaan tanah dari penguasaan yang bersifat komunal menjurus kepada penguasaan individual. Dengan demikian terlihat adanya kecendrungan semakin melemahnya hak ulayat atau kepemilikan bersama.

Pembangunan yang diselenggarakan di Sumatera Barat meliputi berbagai segi kehidupan, guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang selalu meningkat dari waktu ke waktu baik jumlah maupun jenisnya. Ini sangat ditunjang oleh perkembangan pengetahuan dan penguasaan teknologi serta pertambahan penduduk.

Di samping Kotamadya Padang berfungsi sebagai pusat pemerintahan Sumatera Barat, juga merupakan pusat perekonomian yang ditunjang oleh pelabuhan laut (yaitu Teluk Bayur) dan pelabuhan udara (yaitu Tabing yang lebih dikenal dengan Bandara Tabing) dan pusat pendidikan terutama pendidikan tinggi dan akademi yaitu dengan terdapatnya 25 buah Perguruan Tinggi dan Akademi di daerah ini.

Tuntutan akan kelancaran jalannya pemerintahan, pendidikan dan roda perekonomian, memaksa daerah ini melaksanakan pembangunan fisik untuk menyediakan sarana dan prasarana yang lengkap seperti: jalan, perkantoran, pasar, perumahan dan sarana serta prasarana lainnya untuk menunjang berbagai kegiatan yang dilaksanakan. Semua itu merupakan upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Penelitian yang dilaksanakan di Kotamadya Padang ini meliputi latar

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari penelusuran masalah yang diteliti dalam penelitian "Pengaruh Pendaftaran Terhadap Penguasaan Tanah di Kotamadya Padang", ditemukan bahwa pemsertifikatan tanah telah terbukti menyebabkan terjadinya perubahan pola penguasaan dan pola penggunaan tanah. Penelitian ini membuktikan bahwa perubahan pola penguasaan tanah secara nyata didorong oleh terjadinya perubahan persepsi terhadap tanah sebagai lambang martabat kaum yang harus dipertahankan, sebagai akibat adanya sertifikat hak milik atas tanah. Perubahan pola penguasaan tanah kurang nyata kelihatan dalam hal terjadinya penjualan tanah yang dipengaruhi oleh adanya sertifikat hak milik atas tanah, dan perubahan penguasa tanah setelah disertifikatkan yang dipengaruhi atau disebabkan oleh penunjukan nama seseorang dalam sertifikat.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan dalam pola penggunaan tanah yang terlihat dalam perubahan pelaksanaan peraturan adat tentang pengolahan dan penguasaan tanah yang dipengaruhi oleh dilaksanakan pemsertifikatan tanah, dan perubahan jumlah anggota keluarga yang mengolah tanah yang dipengaruhi atau disebabkan oleh adanya motivasi atau alasan mersertifikatkan tanah. Namun perubahan pola pengolahan atau penggunaan tanah tidak nyata terlihat dalam hal terjadinya perubahan pelaksanaan peraturan adat tentang pengolahan dan penggunaan tanah yang dipengaruhi atau disebabkan oleh adanya

penguasaan pribadi atas tanah, jumlah anggota keluarga yang mengolah dan menggunakan tanah yang dipengaruhi atau disebabkan oleh adanya pensertifikatan tanah.

Selanjutnya penelitian ini juga membuktikan bahwa di samping kegiatan pembangunan yang diharapkan dapat dijadikan pemicu perubahan sosial atau perubahan masyarakat (*agent of social change*), juga dapat menimbulkan pertentangan masalah tanah yang terlihat dari kasus tanah yang diajukan ke pengadilan negeri. Hal ini dapat berakibat hancurnya hubungan kekerabatan Matrilinial, karena umumnya sengketa tanah di pengadilan negeri Padang adalah sengketa tanah adat.

Kegiatan pembangunan yang terbukti menyebabkan terjadinya kasus tanah adalah di pengadilan negeri adalah pembangunan sarana pendidikan, kesehatan, perumahan dan pembangunan hukum pertanahan yaitu pensertifikatan tanah.

Adanya kasus tanah yang diajukan ke pengadilan bukanlah berarti masyarakat menolak dilaksanakan pembangunan, tetapi disebabkan oleh tidak terdapatnya kesepakatan anggota kaum dalam melepas tanahnya untuk dilaksanakan pembangunan fisiknya dan tidak siapnya masyarakat menerima atau menyerap akibat lanjut dari dilaksanakan pembangunan hukum pertanahan.

Di samping kegiatan pembangunan terhadap tanah dapat menimbulkan kasus tanah, penelitian ini juga memperlihatkan bahwa kegiatan pembangunan dapat menghindari kasus tanah, sebagaimana yang terlihat dengan adanya pembangunan jalan.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kasus tanah yang timbul akibat dilaksanakan pembangunan adalah disebabkan oleh kurang tepatnya pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan pembebasan tanah. Pada umumnya pendekatan yang digunakan adalah pendekatan "yuridis" yaitu melihat siapa penguasa atau pemilik yang tertera dalam sertifikat hak milik atas tanah, dengan tanpa memperhatikan anggota keluarga lainnya. Sedangkan tanah di Minangkabau umumnya tanah adat, yang penguasaannya secara bersama-sama. Suatu hal yang membuat pembangunan jalan dapat berjalan lancar, bahkan dapat mengurangi pertentangan adalah dari pendekatan yang digunakan. Pendekatan yang digunakan dalam pembangunan jalan adalah pendekatan "yuridis" di samping pendekatan "antropologis".

Di luar kesimpulan di atas penulis ingin mengkaitkan penelitian ini dengan kenyataan dalam masyarakat yang diteliti. Penulis berkesimpulan bahwa perubahan-perubahan atau apa yang terdapat di Kotamadya Padang sehubungan dengan pengaruh pembangunan terhadap penguasaan tanah, belum tentu juga dialami oleh daerah-daerah lain di Sumatera Barat, mengingat kegiatan pembangunan di daerah lain belum sekomplek kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di daerah Kotamadya Padang.

3.2 S A R A N

Untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pembangunan yang ditemui terutama dalam pelaksanaan pembebasan tanah, dan untuk menghindari timbulnya pertentangan yang disebabkan oleh masalah

tanah, hendaklah dilaksanakan pendekatan antropologis atau pendekatan terhadap norma atau aturan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, di samping menerapkan pendekatan secara yuridis.

KELISTAKAAN

- Direktorat Tata Guna Tanah, Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri 1985. Penentuan Lokasi Miskin Propinsi Jambi. Publikasi (belum diterbitkan).
- Hanser, P.M., Gardner, R.W., Laquian, A.A., El-Shakhs, S. 1985. Penduduk dan Masa Depan Perkotaan, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Muhammad, B. 1985. Pokok-Pokok Hukum Adat, Pradaya Paramita, Jakarta.
- Radjab, Muhammad. 1969. Sistem Kekerabatan di Minangkabau, Centre For Minangkabau Studies Press, Padang.
- Rusli, S. 1985. Pengantar Ilmu Kependudukan, LPJES, Jakarta.
- Salin, E. 1983. Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Penerbit Mutiara, Jakarta.
- 1986. Pembangunan Berwawasan Lingkungan, LPJES, Jakarta.
- Sayogo 1977. Garis Kemiskinan Dan Kebutuhan Minimum Pangan, Lembaga Penelitian Sosiologi Pedesaan Institut Pertanian Bogor.
- Sedjoetara, D. A. 1984. Faktor-Faktor Sosial Budaya Yang Harus Diperhatikan Dalam Penganeka Ragaman Konsumsi Pangan Workshop on Food Nutrition Planning, Departemen Pertanian Republik Indonesia, Ungerah, 11 Juli 1984
- Szerjani, M. 1985. Ekologi Manusia, Pusat Penelitian Sumber Daya Manusia dan Lingkungan Hidup Universitas Indonesia, Jakarta, Mei 1985.
- Thalib, S. 1978. Peranan Ninik Manak Dalam Pembangunan di Sumatera Barat, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.